

**MOTIVASI KETERLIBATAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
PADA PEMILU 2019 DI KOTA PANGKALPINANG**

**Fariska Novianda Beltim, Ranto dan Putra Pratama Saputra**

Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail: nanda.mariska222@gmail.com, rantopalempat@gmail.com,  
putraps92@gmail.com

Diterima:

23 Juli 2021

Direvisi:

08 Agustus 2021

Disetujui:

15 Agustus 2021

**Abstrak**

Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional untuk menduduki lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pemberian sanksi pemilu kepada partai politik di daerah pemilihan tertentu akan terancam gugur jika daftar calon tidak mencukupi kuota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Keterlibatan perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif apakah niat dari hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja. Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal yang berfokus pada hak-hak individual dan kesetaraan kesempatan, dan juga beragumen bahwa perubahan kebijakan hukum dan sosial akan membantu perempuan mencapai ini. Dengan begitu feminisme liberal juga menginginkan agar wanita dapat setara dengan pria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk pemenuhan kuota, ada yang memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan terhadap politik dan juga pemerintah membuat undang-undang penetapan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan sehingga kader partai diharuskan mencari perempuan untuk dijadikan pelengkap partainya jika ingin terus maju kedalam pemilu.

**Kata kunci:** *Feminisme liberal, Keterlibatan perempuan, pemenuhan kuota*

**Abstract**

*Indonesia uses a proportional election system to occupy the people's representative institutions: DPR, Province DPRD, and Regency/Municipal DPRD. It is corresponds to the Law Number 8 of 2012 which explains about the provide of election sanctions on political parties in certain electoral districts will be threatened with failure if the candidate list does not enough the*

*30% quota for women's representation will be threatened with failure if the candidate lists do. The study was conducted to identify the motivations of women legislative candidates in the 2019 election in Pangkalpinang. The women's involvement that participated in candidacy for legislative members based on the intention of their conscience or through the invitation of friends or relatives to participate only in fulfilling the quota. The study used the Liberal Feminist theory that focused on individual rights and equality, and opportunity and argued that changes in legal and social policy would help women's achievements. The method used in this research is the descriptive qualitative method. Based on the study results, the motivation for the involvement of women DPRD candidates in Pangkalpinang City 2019 was more than 50 percent of the number of women involved in the nomination was for quota fulfillment. Some were already party cadres but were told to participate in fulfilling quotas, and some were not party cadres at all but invited their relatives to join the legislative candidates. The deficiency of women's participation in politics and the government makes a law determining the involvement of women at least 30 percent in candidacy. The party cadres are required to look for women to be used as complements to their party if they want to continue for the elections.*

**Keywords :** liberal feminism, women's involvement, quota fulfillment

## Pendahuluan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan memberikan sanksi tidak boleh ikut pemilu di daerah pemilihan tertentu jika daftar calon di daerah pemilihan itu tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan (Sutrisno, 2016). Partai politik manapun terancam gugur ikut serta dalam pemilu jika daftar perempuan kurang dari kuota yang ditentukan tersebut (Shofiyah, 2019). Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam legislatif tidak hanya berbicara agar perempuan mampu mengakomodir kepentingan semata, tetapi terdapat nilai yang lebih mendalam, yaitu etika kepedulian perempuan dalam bereksistensi dan relasi antar individu. Partai politik memiliki peranan untuk menunjang kualitas dan kuantitas perempuan untuk masuk ke dalam politik praktis. Penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen juga beragam (Fajar Ahmad Setiawan, Purwanti, & ALW, 2016).

Kepengurusan partai perempuan menduduki posisi yang kurang strategis (Zamroni, 2013). Menurut (Rokhmansyah, 2016) konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial budaya laki-laki dan perempuan. Seperti di Bangka Belitung pada pemilu tahun 2019, beberapa perempuan membuktikan dirinya mampu bersaing dan ikut andil dalam memperebutkan beberapa kursi politik terkhusus di DPRD Kota Pangkalpinang (Suci, 2020). Dari adanya ketentuan Undang-undang tersebut, perempuan yang terlibat pencalonan merupakan kader partai atau hanya sekedar dicomot guna untuk memenuhi kebutuhan kuota partai yang harus diisi 30% perempuan. Kader partai akan mengajak perempuan kenalannya untuk mengikuti pencalonan supaya partai yang bersangkutan bisa mengikuti pemilu jika kuota keterwakilan perempuan sudah mencukupi. Pada pemilu legislatif 2019 di Kota

Pangkalpinang tersebut jumlah anggota legislatif perempuan bertambah 1 dibanding tahun 2014 yang lalu. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan, jumlah kursi yang diperebutkan dalam kontestasi pemilu sebanyak 30 dan perempuan hanya mendapat 3 kursi. Hasil calon legislatif yang terpilih hanya dapat dipresentasikan oleh tiga parpol yaitu PDIP, Gerindra, dan Nasdem

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Keterlibatan perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif apakah niat dari hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja (K. Setiawan, Jones, Diprose, & Savirani, 2020). Pada penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vandyk Lumiu (2014) yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan”. Kedua, dari Yogi Maulana Malik (2019) yang berjudul “Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Lampung 2019 (Studi Pada Partai Nasdem Dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung)”. Ketiga, kemudian penelitian dari Riris Resita Simamora (2019) yang berjudul “Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan mode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari data bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan focus (Puspitasari, 2019). Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap objek pada suatu saat tertentu (Anggito & Setiawan, 2018). Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian akan memberikan gambaran mengenai alasan terlibatnya caleg perempuan dan kesiapan apa saja yang dilakukan caleg perempuan dalam mendapatkan akses politiknya di masyarakat (Pratama, 2016). Metode ini dinilai cukup relevan untuk digunakan didalam penelitian ini, dalam memberikan gambaran dan juga menganalisa dalam mengkaji realitas objek penelitian yang akan dilakukan dilapangan (Hidayat, 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Rincian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Menurut (Abdurohman, 2015) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58).

Data sekunder, merupakan data yang digunakan untuk memperkuat data primer yang didapatkan dari catatan, buku, dan lain sebagainya. Beberapa peneliti mengutip dokumen seperti literatur/teks akademis, majalah, surat kabar, brosur, lainnya. Karena biasanya dokumen ditulis oleh pihak ketiga, seperti jurnalis atau penulis skenario yang bukan informan penelitian, data yang digunakan tentu saja bukan tangan pertama. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data sekunder

dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari 16 caleg perempuan dari partai yang mengikuti pencalonan legislatif pada pemilu DPRD 2019 di Kota Pangkalpinang.

### Hasil dan Pembahasan

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dengan berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah. Pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019. Berikut hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait.

Tabel 1.

No	Nama	Partai	Motivasi	Menjadi	Alasan Menjadi Caleg
			Caleg Hati Nurani	Dicomot	
1	Yundarti	HANURA		√	1. Diajak teman 2. Ingin meningkatkan UMKM
2	Meli Oktaria	PAN		√	1. Diajak dari teman suami 2. Ingin memajukan Kota Pangkalpinang
3	Gayatri	BERKARYA	√		1. Hati nurani 2. Ingin membuat perempuan mempunyai kebijakan politik
4	Laila Hillaliah	PKS	√		1. Hati nurani 2. Untuk bermanfaat untuk orang lain 3. Membentuk perempuan yang mandiri
5	Lissandra Purnami Yantikah	PBB		√	1. Diajak teman 2. Ingin meningkatkan UMKM
6	Yusrolina	GARUDA		√	1. Pemenuhan kuota supaya suami bisa menjadi caleg
7	Ferawati	PERINDO	√		1. Keinginan diri sendiri 2. Ingin wanita berperan aktif di politik
8	Tety Oktavianty	PKB		√	1. Disuruh paman
9	Yunia Sari Hasan	GOLKAR	√		1. Keinginan diri sendiri 2. Ingin wanita berperan aktif di politik 3. Membentuk perempuan yang mandiri
10	Meitarini	NASDEM		√	1. Pemenuhan kuota 2. Ingin kesetaraan gender supaya tidak semua diurus laki-laki
11	Reni Utari	PKPI		√	1. Diajak teman 2. Ingin memajukan Kota Pangkalpinang
12	Ellein Marsianti	GERINDRA		√	1. Pemenuhan kuota 2. Mengangkat UMKM 3. Pendekatan ke perempuan melalui usaha-usaha
13	Eka Wahyuningsih	DEMOKRAT	√		1. Keinginan dari hati 2. Ingin perempuan aktif di gerakan-gerakan usaha 3. Perempuan aktif di politik
14	Yusliana	PPP		√	1. Diajak teman 2. Mengangkat harkat dan

				martabat perempuan	
15	Yusnateli	PSI	√	1. Diajak teman 2. Menyuarakan kaum perempuan 3. Mengangkat harkat dan martabat perempuan	
16	Marlina	PDIP	√	1. Pemenuhan kuota	

Penelitian ini berfokus pada motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan dalam pemilu. Salah satu hal yang hangat dalam perbincangan publik di politik adalah permasalahan gender. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam politik belum begitu banyak. Perempuan Indonesia tertinggal dalam kehidupan politik. Di Indonesia telah berkomitmen bahwa menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konferensi nasional maupun internasional. Menggunakan teori Feminisme Liberal mendefinisikan Feminisme Liberal berfokus pada hak-hak individual dan kesetaraan kesempatan, dan juga ber argumen bahwa perubahan kebijakan hukum dan sosial akan membantu perempuan mencapai ini. Dengan begitu feminisme liberal juga menginginkan agar wanita dapat setara dengan pria (Hannam, 2007: 144).

Kaitan antara penelitian ini dengan teori yang digunakan, yaitu melalui peraturan baru yang dibuat pemerintah dalam undang-undang pemilu berupaya untuk menekan para perempuan lebih aktif berkecimpung di dunia politik agar terjadinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya pemerintah membuat undang-undang mewajibkan 30 persen keterlibatan perempuan disetiap partai yang ingin mendaftarkan dirinya di dalam pemilu. Hal ini supaya perempuan bisa lebih aktif didalam politik dan juga pemerintah menginginkan perempuan juga terlibat didalam pembuatan kebijakan.

Budiarjo (1981: 3) memberikan penjelasan bahwa di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu penyelenggaraan kekuasaan oleh absah rakyat. Partisipasi politik tentu saja akan sangat berarti apabila perempuan turut terlibat didalamnya. Di dalam negara yang sedang belajar menuju demokratis yang sesungguhnya seperti Indonesia, adanya partisipasi perempuan yang lebih besar maka dianggap menjadi lebih baik. Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif merupakan gambaran proses demokrasi dimana partai-partai politik memberikan otoritas bagi perempuan untuk membuat kebijakan yang berorientasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan khususnya kesetaraan gender. Jelas bahwa kedudukan perempuan didalam politik tidak dapat dikesampingkan, karena memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik walaupun masih kurang nampaknya perempuan telah berusaha kearah yang lebih baik dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu harus memiliki keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30 persen. Dalam rangka pemilihan umum legislatif, kemampuan, kualitas dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk pemahaman akan sistem politik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diharapkan melalui pemilihan umum legislatif ini masyarakat bisa menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam partisipasi politik khususnya dalam pemilu legislatif dapat mengarahkan bentuk atau pola partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi pancasila. Menurut Haryanto (1984: 82) pemilihan umum adalah merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara

dalam kehidupan bernegara, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh mana tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan bernegara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk pemenuhan kuota, ada yang memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan. Caleg perempuan yang ikut dalam pemilu legislatif juga mempunyai keinginan seperti menginginkan perempuan lebih aktif di politik, ingin meningkatkan UMKM, ingin memajukan Kota Pangkalpinang, ingin membentuk perempuan yang mandiri, ingin mengangkat martabat perempuan dan menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan terhadap politik dan juga pemerintah membuat undang-undang penetapan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan sehingga kader partai diharuskan mencari perempuan untuk dijadikan pelengkap partainya jika ingin terus maju kedalam pemilu. pentingnya keterlibatan perempuan di dalam politik, karena selain untuk menambah wawasan perempuan juga untuk untuk membuat keputusan dan kebijakan yang diwacanakan bisa mewakili perempuan lain karena para perempuan berpikir lelaki kurang mewakili apa yang perempuan inginkan. Hambatan yang dirasa dari keterwakilan perempuan yang hanya untuk pemenuhan yaitu belum adanya kesiapan diri sehingga mereka hanya ikut apa yang dijalankan partai. Beberapa caleg perempuan bahkan tidak melakukan kampanye atau mereka hanya kampanye seadanya melalui sosial media. Hambatan lain yang juga dirasakan yaitu kurangnya materi untuk berkampanye sehingga mereka hanya mengandalkan partai.

Perjuangan perempuan di Indonesia era demokrasi seperti sekarang ini terutama dalam bidang politik masih perlu upaya yang cukup keras terutama untuk kaum perempuan yang tingkat keterlibatannya masih rendah. Seorang perempuan untuk menjadi pemimpin atau berkarir diluar rumah misalnya berperan dalam partai politik atau pemerintahan lebih banyak mendapat hambatan dibanding laki-laki, terutama sikap budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima. Dengan demikian persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan dan peranannya dalam kehidupan politik di negara kita perlu diupayakan, dalam artian partisipasi perempuan agar benar-benar dapat diperhitungkan keberadaannya. Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia apabila perempuan itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuannya yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan dengan kaum laki-laki.

### **Bibliografi**

- Abdurohman, Dede. (2015). *Pengaruh potongan harga terhadap penjualan pada PT. Dunia Bangunan BSD.(Skripsi Manajemen 2015)*.
- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, Aziz Alimul. (2015). *Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif*. Yogyakarta: Health Books Publishing.
- Mutrofin, Mutrofin. (2020). *Organisasi kemasyarakatan perempuan dan politik local: analisis eksperimentasi politik Muslimat Nahdlatul Ulama Trenggalek pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Pratama, Andri. (2016). *Strategi Taktik Pemenang Calon Legislatif Study Tentang Perempuan Caleg Dari Partai Demokrat Pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin (Skripsi)*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Puspitasari, Nining. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Pengambilan Keputusan Penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah)(Studi Kasus pada 15 UMKM di Kabupaten Malang)*. Malang: STIE Malangucecwara.
- Ramdana, Fitalena. (2019). *Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/*.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Setiawan, Fajar Ahmad, Purwanti, Ani, & ALW, Lita Tyesta. (2016). Peran Anggota Dprd Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–20.
- Setiawan, K., Jones, Beech, Diprose, R., & Savirani, A. (2020). *Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*.
- Shofiyah, Anis. (2019). *Dinamika gerakan sosial perempuan Iran: pra & pasca revolusi 1979*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Suci, Indah Ratna Pratiwi. (2020). *Modal Sosial Anggota Legislatif Muda Dprd Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*. Sumatra Barat: Universitas Andalas.
- Sutrisno, Sutrisno. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 105–117.
- Zamroni, Mohammad. (2013). Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender. *Jurnal Dakwah*, 14(1), 103–132.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).